



BKPSDM
Kabupaten
Temanggung

RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan BKPSDM Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yaitu *"Meningkatnya kualitas SDM aparatur"*, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung melaksanakan 3 Program dan 10 Kegiatan, yaitu Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut dibutuhkan dukungan anggaran sejumlah Rp5.305.727.431,00.

Demikian Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang akan datang, dengan harapan semua rencana kegiatan yang telah disusun mendapatkan prioritas dalam APBD dan dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Temanggung, 10 Juli 2024

KEPALA BKPSDM
KABUPATEN TEMANGGUNG



RIPTO SUSILO
Pembina Utama Muda

NIP. 19670427 198703 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN 2023	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2023 dan capaian Renstra BKPSDM Tahun 2018-2023	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM	28
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM.....	45
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPd	48
2.5. Inovasi BKPSDM	57
2.6. Penghargaan	58
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	59
3.1. Telaahan terhadap arah Kebijakan Nasional	59
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM	59
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	62
4.1. Program dan Kegiatan	62
BAB V : PENUTUP	124

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM s.d Tahun 2023	10
Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM s.d Triwulan I Tahun 2024	18
Tabel 2.3. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah BKPSDM Triwulan I Tahun 2024 (Laporan IKPD) Kabupaten Temanggung	29
Tabel 2.4. Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung Tahun 2023	35
Tabel 2.5. IP ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024..	41
Tabel 2.6. Pencapaian skor dimensi IP ASN triwulan I tahun 2024	41
Tabel 2.7. Capaian Cakupan Pengembangan SDM Triwulan I 2024	39
Tabel 2.8. Capaian Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan Layanan Aparatur Triwulan I 2024	43
Tabel 2.9. Capaian Cakupan Pembinaan SDM Aparatur Triwulan I 2024	44
Tabel 2.10. Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025	50
Tabel 2.11. Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2021-2023	57
Tabel 2.12. Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023	58
Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2025	60
Tabel 4.1. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Temanggung Tahun 2025	63
Tabel 4.2. Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Temanggung Tahun 2025	67

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 10 Juli 2024

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



EWIEK KHAVIDA, S.S.T.P., M.M.
NIP. 19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator



HANI PUJI UTAMI, S.Sos.
NIP. 19960707 202202 2 001

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

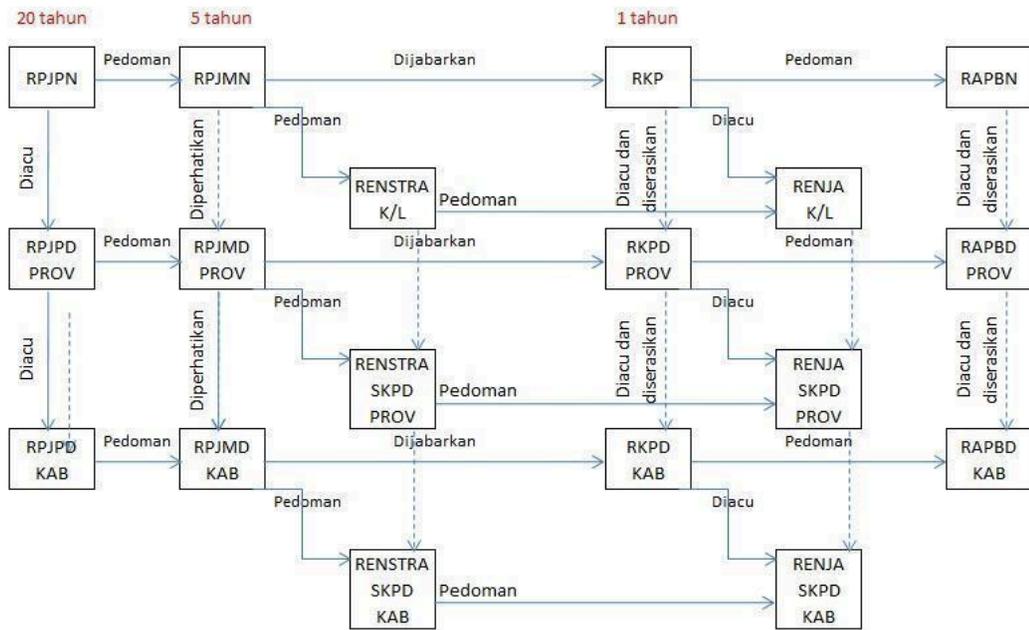
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan BKPSDM Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Renja BKPSDM Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hirarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja BKPSDM Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hirarki Perencanaan Pembangunan

Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja BKPSDM, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal BKPSDM, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan BKPSDM;
- 2) Kondisi pelayanan BKPSDM;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM;
- 4) Data Pokok Pembangunan BKPSDM;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan BKPSDM;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan BKPSDM.

b. Analisis gambaran pelayanan BKPSDM;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan BKPSDM adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan BKPSDM.

- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra BKPSDM untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, dan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada BKPSDM.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM tahun lalu berdasarkan renstra BKPSDM;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra BKPSDM dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra BKPSDM tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra BKPSDM;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra BKPSDM;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra BKPSDM sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan

tugas dan fungsi BKPSDM berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra BKPSDM.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan BKPSDM dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan BKPSDM;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BKPSDM;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BKPSDM;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk BKPSDM.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BKPSDM.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan

pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja BKPSDM;

Penyusunan dokumen rancangan Renja BKPSDM merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja BKPSDM;

Penyempurnaan rancangan Renja BKPSDM perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja BKPSDM dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja BKPSDM dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja BKPSDM yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan

masuk dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; disesuaikan dengan perda yang terbaru;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3

Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja BKPSDM Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi BKPSDM Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja BKPSDM untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja BKPSDM Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM selama kurun waktu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan BKPSDM Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja BKPSDM Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKPSDM Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja BKPSDM Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2023 dan Capaian Renstra BKPSDM Tahun 2018-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2023 terhadap capaian Renstra BKPSDM Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja BKPSDM sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2024.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra BKPSDM Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2023 sebagai tahun kelima pelaksanaan Renstra (Perangkat Daerah) 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM
s.d Tahun 2023

KODE	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)			TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.388.118.000	5.166.005.936		6.664.702.584	5.166.005.936		4.970.726.460		
503	KEPEGAWAIAN				5.688.118.000	4.740.495.936		6.053.702.584	4.740.495.936		4.559.693.570		
50301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.885.118.000	4.322.516.836		4.488.702.584	4.322.516.836		4.169.446.207		
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100			100			100		100	
50301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.176.118.000	3.773.321.506		3.889.495.584	3.773.321.506		3.653.481.312		
5030120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	35/12	4.176.118.000	3.773.321.506	35/12	3.889.495.584	3.773.321.506	35/12	3.653.481.312	100	96,82
50301205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				11.400.000	-		-	-		-		
5030120502	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	36	11.400.000	-	0	-	-	0	0	100	0,00
50301206	Administrasi Umum Perangkat Daerah				144.600.000	135.594.410		135.600.000	135.594.410		126.613.225		

5030120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan	12	5.000.000	3.599.910	12	3.600.000	3.599.910	12	3.588.000	100	99,67
5030120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	21.000.000	19.999.500	12	20.000.000	19.999.500	12	19.944.000	100	99,72
5030120605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	18.600.000	20.000.000	12	20.000.000	20.000.000	12	19.930.950	100	99,65
5030120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	30.000.000	41.995.000	12	42.000.000	41.995.000	12	40.269.500	100	95,89
5030120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	70.000.000	50.000.000	7	50.000.000	50.000.000	12	42.880.775	100	85,76
50301207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				57.000.000	-		-	-	-	-		
5030120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	1	35.000.000	-	0	-	-	0	0	0	0,00
5030120711	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	22.000.000	-	0	-	-	0	0	0	0,00
50301208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				331.000.000	304.605.900		292.607.000	304.605.900		283.952.636		

5030120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8.000.000	5.000.000	12	5.000.000	5.000.000	12	930.000	100	18,60
5030120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	48.000.000	39.999.000	12	40.000.000	39.999.000	12	33.446.421	100	100,00
5030120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	275.000.000	259.606.900	12	247.607.000	259.606.900	12	249.576.215	100	96,14
50301209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				165.000.000	108.995.020		171.000.000	108.995.020		105.399.034		
5030120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	90.000.000	80.000.000	19	80.000.000	80.000.000	19	77.992.034	100	97,49
5030120905	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	3.000.000	1.997.500	5	2.000.000	1.997.500	5	1.900.000	100	95,12
5030120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	35.000.000	25.000.000	10	25.000.000	25.000.000	10	24.992.000	100	99,97
5030120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	30.000.000	-	5	62.000.000	-	5	0		

5030120911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	7.000.000	1.997.520	5	2.000.000	1.997.520	5	515.000	100	25,78
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1											87,50	69,41	
Predikat											Tinggi		
50302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				803.000.000	417.979.100		1.565.000.000	417.979.100		390.247.363		
		Persentase penyusunan formasi pegawai	%	100			100			100		100	
		Persentase penyelesaian pensiun PNS tepat waktu	%	100			100			100		100	
		Persentase penyelesaian kenaikan pangkat tepat waktu	%	100			100			100		100	
		Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional	%	100			100			100		100	
		Persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas	%	80			80			89,42		100	

		Persentase perempuan pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas	%	48			48			41,91		87,31	
		Persentase pelanggaran disiplin ASN	%	0,2			0,2			0,18		100	
		Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	%	90			90			71,43		79,37	
		Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	%	95			95			100		100	
50302201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				345.000.000	173.213.500		290.000.000	173.213.500		147.493.813		
5030220102	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	3	270.000.000	148.214.000	3	260.000.000	148.214.000	3	122.733.513	100	82,81
5030220106	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	12	30.000.000	9.999.500	12	10.000.000	9.999.500	12	9.886.900	100	98,87

5030220110	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	45.000.000	15.000.000	4	20.000.000	15.000.000	4	14.873.400	100	99,16
50302202	Mutasi dan Promosi ASN				260.000.000	70.000.000		135.000.000	70.000.000		69.724.700		
5030220202	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	1000	50.000.000	10.000.000	1000	15.000.000	10.000.000	693	9.973.700	69,3	99,74
5030220203	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi	Dokumen	2	210.000.000	60.000.000	2	120.000.000	60.000.000	2	59.751.000	100	99,59
50302203	Pengembangan Kompetensi ASN				83.000.000	144.766.000		1.065.000.000	144.766.000		144.492.950		
5030220302	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Dokumen	2	45.000.000	134.766.000	2	1.000.000.000	134.766.000	2	134.765.700	100	100
5030220304	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	10	21.000.000	-	10	50.000.000	-		-		
5030220314	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	300	17.000.000	10.000.000	300	15.000.000	10.000.000	1064	9.727.250	100	97,27
50302204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				115.000.000	29.999.600		75.000.000	29.999.600		28.535.900		
5030220401	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	30.000.000	9.999.800	1	22.000.000	9.999.800	1	9.854.500	100	98,55

5030220403	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	46	15.000.000	9.999.800	46	7.000.000	9.999.800	46	9.166.300	100	91,66
5030220407	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan	Orang	140	50.000.000	10.000.000	140	37.000.000	10.000.000	384	9.515.100	100	95,15
5030220408	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Laporan	15	20.000.000	-	15	9.000.000	-				
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1											96,93	96,28	
Predikat											Sangat Tinggi		
504	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.700.000.000	425.510.000		611.000.000	425.510.000		411.032.890		
50402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1.700.000.000	425.510.000		611.000.000	425.510.000		411.032.890		
		Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat kepemimpinan	%	35			35			36,72		100	
		Persentase ASN yang memenuhi kompetensi Diklat teknis dan fungsional	%	18			18			31,67		100	
50402201	Pengembangan Kompetensi Teknis				100.000.000	43.800.000		200.000.000	43.800.000		40.626.100		

5040220103	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	150	100.000.000	43.800.000	150	200.000.000	43.800.000	191	40.626.100	100	100
50402202	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1.600.000.000	381.710.000		411.000.000	381.710.000		370.406.790		
5040220207	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	50	1.600.000.000	381.710.000	50	411.000.000	381.710.000	62	370.406.790	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program C1											99,62	96,94	
PREDIKAT											Sangat Tinggi		
JUMLAH					7.388.118.000	5.166.005.936		6.664.702.584	5.166.005.936		4.970.726.460		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH											94,68	96,22	
PREDIKAT											Sangat Tinggi		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH											96,97		
PREDIKAT											TIDAK TERCAPAI		

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM
s.d Triwulan I Tahun 2024

KODE	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)			TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.753.906.163	5.568.232.428		8.073.770.663	5.568.232.428		804.337.196		
503	KEPEGAWAIAN				5.608.752.163	4.959.232.428		6.129.371.663	4.959.232.428		798.059.196		
50301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	4.280.601.163	4.525.232.428	100	4.280.601.163	4.525.232.428	100	785.274.696		
50301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	3.681.416.844	3.926.081.531	100	3.681.416.844	3.926.081.531	100	695.230.707		
5030120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	35	3.681.416.844	3.926.081.531	35	3.681.416.844	3.926.081.531	33	695.230.707	25	17,71
50301206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	%	100	135.593.000	137.076.340	100	135.593.000	137.076.340		7.531.000		

5030120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3.599.500	3.599.500	12	3.599.500	3.599.500	3	-	25	0,00
5030120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	19.999.500	19.999.000	12	19.999.500	19.999.000	3	-	25	0,00
5030120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	20.000.000	20.000.000	12	20.000.000	20.000.000	3	192.500	25	0,96
5030120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	41.994.000	41.993.840	12	41.994.000	41.993.840	3	-	25	0,00
5030120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	50.000.000	51.484.000	12	50.000.000	51.484.000	3	7.338.500	25	14,25
50301208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	304.596.300	303.094.397	100	304.596.300	303.094.397	100	69.984.989		
5030120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	3.500.000	12	5.000.000	3.500.000	3	-	25	0,00
5030120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	39.989.400	39.989.400	12	39.989.400	39.989.400	3	8.036.431	25	20,10

5030120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	259.606.900	259.604.997	12	259.606.900	259.604.997	3	61.948.558	25	23,86
50301209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan perangkat daerah	%	100	158.995.019	158.980.160	100	158.995.019	158.980.160	100	12.528.000		
5030120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	80.000.000	79.996.200	19	80.000.000	79.996.200	11	10.298.000	58	12,87
5030120905	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	353	1.997.500	1.997.400	353	1.997.500	1.997.400		-	0	0,00
5030120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	408	25.000.000	24.991.200	408	25.000.000	24.991.200	3	1.770.000	1	7,08
5030120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	49.999.999	49.999.000	2	49.999.999	49.999.000		-	0	
5030120911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	45	1.997.520	1.996.360	45	1.997.520	1.996.360	1	460.000	2	23,04

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1												20,42	9,22
												Predikat Tinggi	
50302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				1.328.151.000	434.000.000		1.848.770.500	434.000.000		12.784.500		
		Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	%	41,39			41,39			37,98		91,76	
		Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur	%	86,5			86,5			66,82		77,25	
50302201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Informasi Kepegawaian ASN	Dokumen	3	256.257.000	165.000.000	3	306.121.000	165.000.000	1	7.018.000		
5030220102	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	192.358.000	140.000.000	1	202.765.000	140.000.000	1	6.643.000	100	4,75
5030220106	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	400	28.757.000	10.000.000	400	28.252.000	10.000.000	84	-	21,00	0,00
5030220110	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	3	35.142.000	15.000.000	3	75.104.000	15.000.000	1	375.000	33,33	2,50
50302202	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Mutasi dan Promosi ASN	Dokumen	2	222.140.000	70.000.000	2	214.408.000	70.000.000	1	5.766.500		

5030220202	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	750	22.140.000	10.000.000	750	39.408.000	10.000.000	549	903.000	73,2	9,03
5030220203	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi	Dokumen	6	200.000.000	60.000.000	6	175.000.000	60.000.000	3	4.863.500	50,00	8,11
50302203	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pengembangan Kompetensi ASN	Dokumen	3	775.301.500	160.000.000	2	1.216.571.500	160.000.000	1	-		
5030220302	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Dokumen	1	748.000.000	150.000.000	1	1.171.000.000	150.000.000		-	0	0
5030220304	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	12	-	-	12	20.000.000	-		-		
5030220314	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	400	27.301.500	10.000.000	400	25.571.500	10.000.000	1	-	0,25	0
50302204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	74.452.500	39.000.000	4	111.670.000	39.000.000	1	-		
5030220401	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	33.964.100	10.000.000	1	31.181.600	10.000.000	1	-	100	0
5030220403	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	1	15.000.000	10.000.000	1	15.000.000	10.000.000	0	-	0	0

5030220407	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan	Orang	300	25.488.400	10.000.000	300	56.488.400	10.000.000	30	-	100	0
5030220408	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1	-	9.000.000	1	9.000.000	9.000.000	4	-		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1												47,78	2,44
Predikat												Sangat Tinggi	
504	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2.145.154.000	609.000.000		1.944.399.000	609.000.000		6.278.000		
50402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				2.145.154.000	609.000.000		1.944.399.000	609.000.000		6.278.000		
		Cakupan Pembinaan SDM Aparatur	%	96,13			96,13			99,98		100	
50402201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis	Laporan	1	315.781.000	54.000.000	1	115.026.000	54.000.000		4.500.000		
5040220103	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	240	315.781.000	54.000.000	240	115.026.000	54.000.000	6	4.500.000	2,50	100
50402202	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi	Laporan	1	1.829.373.000	555.000.000	1	1.829.373.000	555.000.000		1.778.000		

		Manajerial dan Fungsional											
5040220207	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	5	1.829.373.000	555.000.000	5	1.829.373.000	555.000.000	2	1.778.000	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program C1											64,33	33,74	
Predikat											Sangat Tinggi		
JUMLAH					7.753.906.163	5.568.232.428		8.073.770.663	5.568.232.428		804.337.196		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH											44,17	14,45	
PREDIKAT											Sangat Tinggi		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH											89,67		
PREDIKAT											TERCAPAI		

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2023 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra BKPSDM Tahun 2018-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKPSDM di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - a. Indeks Profesionalitas ASN
 - b. Indeks Merit System
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sebagai berikut:
 - a. Persentase penyusunan formasi pegawai
 - b. Persentase penyelesaian pensiun PNS tepat waktu
 - c. Persentase penyelesaian kenaikan pangkat tepat waktu
 - d. Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional
 - e. Persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas
 - f. Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian
 - g. Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat kepemimpinan
 - h. Persentase ASN yang memenuhi kompetensi Diklat teknis dan fungsional
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- g. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - h. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - i. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - j. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - k. Pemeliharaan Mebel
 - l. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - m. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - n. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - o. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - p. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - q. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - r. Pengelolaan Promosi ASN
 - s. Pengelolaan *Assessment Center*
 - t. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - u. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
4. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
 - b. Pembinaan Disiplin ASN
 - c. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - d. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
5. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sebagai berikut:
- a. Persentase perempuan pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas

- b. Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN
6. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN yang ditargetkan 1000 orang ASN namun capaian kinerjanya hanya 693 orang ASN atau 69,3 % adalah karena dari target tersebut sebagian adalah dari ASN Jabatan Fungsional yang persyaratan untuk kenaikan pangkatnya harus memenuhi diantaranya angka kredit yang mencukupi namun belum dapat terpenuhi sehingga belum bisa untuk diusulkan kenaikan pangkatnya. Tindak lanjut ke depannya BKPSDM akan mengadakan Sosialisasi, Bimtek dan Workshop bagi Jabatan Fungsional agar dapat mengembangkan kompetensi dan keahliannya yang dapat menunjang dalam memperoleh nilai angka kredit yang mencukupi agar bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023, maka dapat dikatakan bahwa BKPSDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **99,07%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran sebagai berikut:

- 1. Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian;

Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan I tahun 2024 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

2.2.2 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan BKPSDM dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah BKPSDM Triwulan I Tahun 2024 (**Laporan IKPD**)
 Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW I 2024	Status Capaian				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Indeks Merit System	Angka	0,482	0,5	0,55	0,61	0,61			100	Sangat Tinggi				
2	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	50,09	61,75	61,8	61,85	61,9			100	Sangat Tinggi				
3	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	Persentase	40,29	41,39	42,36	42,57	37,98			89,21		Tinggi			
4	Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan Layanan Aparatur	Persentase	86,41	86,5	86,58	87,67	66,82			76,22		Tinggi			
5	Cakupan Pembinaan SDM Aparatur	Persentase	96,17	96,13	96,15	96,17	99,98			100	Sangat Tinggi				

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status Sangat Tinggi ada 3 terdiri dari:

a. Indeks Merit System.

- Faktor pendorong indikator tersebut adalah

Melaksanakan beberapa sub aspek sistem merit, menyusun dan melengkapi data dukung yang dibutuhkan :

1. Aspek Perencanaan Kebutuhan : Dokumen rencana kebutuhan pegawai tahunan; Dokumen rencana kebutuhan pegawai 5 tahunan
2. Aspek Pengadaan: KAK tentang Pedoman Pengadaan ASN; Laporan evaluasi latsar
3. Aspek Pengembangan Karir: Melaksanakan asesmen serta menyusun dokumen pegawai yang telah melaksanakan asesmen; Dokumen analisis kesenjangan kualifikasi; Laporan diklat pegawai terbaru; KAK coaching, mentoring dan magang; Dokumentasi
4. Aspek Promosi dan Mutasi: Dokumen pelaksanaan seleksi terbuka
5. Aspek Manajemen Kinerja:Rekap analisis kesenjangan kinerja seluruh pegawai; Pengembangan aplikasi 360 derajat untuk menilai sikap, perilaku dan kinerja pegawai
6. Aspek Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin: Draft Peraturan Bupati Temanggung tentang Perlindungan, Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai; Dokumentasi sosialisasi tentang kedisiplinan
7. Aspek Perlindungan dan Pelayanan: Draft Peraturan Bupati Temanggung tentang Perlindungan, Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai; Dokumentasi kegiatan perlindungan dan pelayanan pegawai di bidang kesehatan dan hukum
8. Aspek Sistem Informasi: Pengembangan aplikasi sinta merit untuk menampilkan profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta; Dokumen integrasi SIMPEG; serta

tersedianya dan telah dilakukannya pengembangan aplikasi yang mendukung sistem merit, yaitu aplikasi e-kinerja BKN dan aplikasi PKSP 360 derajat

- Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 1. Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas sehingga belum bisa merumuskan kesenjangan (gap) kompetensi dan kualifikasi.
 2. Belum memiliki rencana suksesi by system untuk seluruh pegawai
 3. Belum menyusun kesenjangan (gap) kinerja.
 4. Penilaian sistem merit masih diprioritaskan untuk instansi yang belum mendapatkan nilai dengan kategori baik, sehingga pada saat ini belum dapat menilaikan sistem merit
- Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 1. Menambah jumlah pemetaan pegawai melalui asesmen
 2. Melakukan penilaian kinerja, sikap dan perilaku pegawai secara rutin.
 3. BKPSDM dengan Dinkominfo mengembangkan aplikasi Sinta Merit untuk manajemen talenta dan aplikasi penilaian kinerja PKSP 360° untuk aspek manajemen kinerja.

b. Indeks Profesionalitas ASN

- Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 1. Update data kepegawaian yang dilakukan oleh BKPSDM lewat aplikasi My SAPK
 2. Update data yang dilakukan secara mandiri oleh ASN lewat aplikasi SIMPEG
 3. Keikutsertaan ASN mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri
 4. Semakin meningkatnya kualifikasi pendidikan pegawai
- Faktor penghambat indikator tersebut adalah

Belum semua pegawai melakukan update data kepegawaian seperti P2KP (kinerja) dan sertifikat diklat (kompetensi) yang merupakan aspek dalam dimensi

penilaian dalam IP ASN.

- Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Koordinasi yang intensif dengan BKN selaku pengelola data kepegawaian (SAPK) dan pemberi rekomendasi/ yang mengeluarkan nilai indeks. Sebagian pegawai telah melakukan update data kepegawaian seperti P2KP (kinerja) dan sertifikat diklat (kompetensi) yang merupakan aspek dalam dimensi penilaian dalam IP ASN.

c. Cakupan Pembinaan SDM Aparatur

- Faktor pendorong indikator tersebut adalah Meningkatnya kepatuhan ASN/PNS terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian
- Faktor penghambat indikator tersebut adalah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terhadap para pejabat struktural belum tersampaikan kepada para pejabat pelaksana/fungsional
- Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Dilakukan sosialisasi kepada unit PD terkecil secara non formal

2. Capaian indikator dengan status Tinggi ada 2 terdiri dari:

a. Cakupan Pengembangan SDM Aparatur

- Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 1. Komitmen dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) untuk segera dilakukan pengisian jabatan yang kosong, dan adanya penyederhanaan birokrasi
 2. Tawaran keikutsertaan Diklat Teknis/Fungsional tidak hanya dari Badan Diklat Provinsi Jateng (BPSDMD) akan tetapi juga dari instansi vertikal penyelenggara diklat
- Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 1. Keterbatasan SDM yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan struktural
 2. Keterbatasan kuota dari penyelenggara diklat manajerial, teknis dan fungsional (BPSDMD Prov. Jateng) dan keterbatasan keuangan daerah untuk pembiayaan diklat.

- Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan kerjasama dengan Badan Diklat Kemendagri dan Badan Diklat Prov.DIY, dan mengusulkan peserta untuk mengikuti diklat yang tidak berbayar ke BPSDM Kemendagri
- b. Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan Layanan Aparatur
1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 1. Anggaran kenaikan pangkat sebagai hak setiap PNS
 2. Tugas PD berusaha untuk mengusulkan kenaikan pangkat tepat waktu.
 2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya pemahaman ASN yang akan mengusulkan kenaikan pangkat tentang persyaratan sesuai peraturan yang berlaku sehingga masih terdapat dokumen usulan yang tidak disetujui BKN karena tidak memenuhi syarat (TMS)
 3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Mengadakan sosialisasi yang lebih intensif tentang persyaratan kenaikan pangkat sesuai peraturan yang berlaku ke pengelola kepegawaian maupun ASN.

2.2.2 Data Pokok

Data Pokok pada BKPSDM terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Kepegawaian dan Data Pokok Pendidikan dan Pelatihan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang Kepegawaian dan Data Pokok Pendidikan dan Pelatihan

a. Indeks Sistem Merit

Penilaian Sistem Merit dilakukan setiap tahun, hasil penilaian Sistem Merit secara mandiri dan penilaian yang telah mendapatkan verifikasi dari KASN dari tahun 2020 hingga triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Indeks Sistem Merit kabupaten Temanggung
tahun 2019- triwulan I 2024

No.	Uraian	Tahun					
		2019	2020*	2021	2022	2023	2024
1.	Penilaian Sistem Merit	n.a	218	113	200	258	258
2.	Indeks Sistem Merit	n.a	0,52	0,259	0,482	0,62	0,62

Sumber : Download Aplikasi sipinter

*=Penilaian mandiri (tidak mendapatkan verifikasi penilaian dari KASN)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil penilaian atau skor indeks sistem merit pada tahun 2021 sangat jauh menurun capaian skornya dibandingkan capaian tahun 2020. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 penilaian Sistem Merit dilakukan secara mandiri lewat aplikasi “sipinter”, namun penilaian mandiri yang kita laksanakan belum mendapatkan verifikasi atau penilaian dari KASN.

Capaian aspek-aspek dalam penilaian mandiri tahun 2020 oleh KASN dilakukan verifikasi untuk penilaian capaian indeks Sistem Merit di tahun 2021, adapun tambahan kinerja setiap aspek penilaian sistem merit yang telah dilakukan di tahun 2021 belum dapat ditambahkan untuk penambahan skor sistem merit tahun 2021 karena dokumen pendukung atau pelaksanaan kegiatannya baru dilaksanakan pada akhir triwulan IV tahun 2021. Penilaian indeks Sistem Merit oleh KASN terakhir dilakukan pada akhir tahun 2022.

Pengukuran skor Sistem Merit di kabupaten Temanggung dilakukan dengan cara pengumpulan bukti dukung yang dibutuhkan tiap sub aspek yang sudah dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung selaku penyelenggara manajemen PNS pemerintah kabupaten Temanggung. Berdasarkan bukti dukung yang ada, dapat diketahui skor dari sistem merit (skor 0 sampai dengan 4 tertuang dalam Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019). Skor tersebut dikalikan dengan bobot sehingga menghasilkan nilai tiap sub aspek, nilai sub aspek dijumlahkan akan menjadi nilai tiap aspek. Dari nilai tiap aspek dijumlahkan akan menjadi total nilai atau indeks Sistem Merit.

Secara rinci hasil perolehan atau skor indeks Sistem Merit tahun 2023 yang telah mendapatkan verifikasi dari KASN sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Indeks Sistem Merit pemerintah kabupaten Temanggung tahun 2023

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI
I	PERENCANAAN KEBUTUHAN (10%)	1. Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK;	Sudah disusun peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah berdasarkan anjab dan ABK, dirinci menurut jenis jabatan, pangkat, deskripsi tugas dan kualifikasi, namun belum ditetapkan dengan keputusan PPK;	2,5	10	10
		2. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi;	Tersedia data kepegawaian yang lengkap berbasis sistem informasi, diperbarui secara berkala dan sudah terintegrasi dengan data kepegawaian lainnya (data kinerja dan disiplin) dalam Sistem Informasi Kepegawaian;	2,5	10	7,5
		3. Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir;	Tersedia data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam Sistem Informasi Kepegawaian untuk lima tahun ke depan dan diperbarui secara otomatis;	2,5	10	10
		4. Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 tahun);	Sudah menyusun rencana pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan jenis jabatan dengan mempertimbangkan Anjab dan ABK;	2,5	10	10
	SUB-TOTAL I					40
II	PENGADAAN (10%)	1. Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan;	Sudah menyusun rencana pengadaan ASN berdasarkan Anjab dan ABK;	2	8	8
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;	Memiliki kebijakan internal namun hanya berbentuk SK Pembentukan Panitia Seleksi jika ada penerimaan pegawai;	2	8	8
		3. Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;	Penetapan hasil penerimaan calon ASN dilakukan secara objektif dan transparan;	2	8	8
		4. Pelaksanaan Pelatihan Dasar	Instansi pemerintah telah melaksanakan Latsar CPNS dalam kurun waktu paling	2	8	8

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
		(Latsar) bagi CPNS;	lama 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai CPNS;			
		5. Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar;	90% - 100% CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang lamar;	2	8	8
	SUB-TOTAL II				40	40
III	PENGEMBANGAN KARIER (30%)	1. Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan;	Sudah tersedia SKJ untuk JPT;	5	10	10
		2. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;	Sudah tersedia profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi untuk JPT, JA dan JF;	5	20	10
		3. Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;	Sudah tersedia Talent Pool untuk JPT, JA dan JF;	5	15	0
		4. Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi;	belum ada rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi untuk seluruh pegawai	2,5	7,5	0
		5. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;	belum ada informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai	2,5	5	2,5
		6. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja;	belum ada informasi tentang kesenjangan kinerja	2,5	7,5	7,5
		7. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;	belum ada strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	2,5	2,5	2,5
		8. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan;	Sudah tersedia program diklat namun belum terstruktur;	2,5	2,5	2,5

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
		9. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;	belum ada peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	2,5	2,5	5
		10. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring;	belum ada Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring	2,5	7,5	5
	SUB-TOTAL III				80	45
IV	PROMOSI DAN MUTASI (10%)	1. Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/Perka Lembaga/Pergub/Perbup/Perwal) tentang pola karir;	Pola karir pegawai dilaksanakan dengan dasar kebijakan (peraturan internal) baik jalur vertikal, horizontal dan diagonal;	5	20	15
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Perka Lembaga/Pergub/Perbup/Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi;	belum ada kebijakan internal (Permen/Perka Lembaga/Pergub/Perbup/Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi	2,5	10	7,5
		3. Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif;	Sudah melaksanakan Pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif di tingkat regional/nasional serta pengisian Administrator dan Pengawas dengan metode assessment tanpa adanya pengaduan atas dugaan pelanggaran sistem merit;	2,5	10	7,5
	SUB-TOTAL IV				40	30
V.	MANAJE MEN KINERJA (20%)	1. Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;	Sudah menyusun kontrak kinerja bagi seluruh pegawai yang diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;	5	20	20
		2. Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif;	Sudah menerapkan metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur untuk seluruh pegawai;	5	20	15
		3. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;	Sudah melaksanakan penilaian kinerja secara berkala 3 bulan sekali yang disertai dengan dialog kinerja;	2,5	5	5

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
		4. Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi;	Sudah menganalisis permasalahan terkait kinerja namun belum terstruktur;	5	10	5
		5. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir;	Belum menggunakan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir	2,5	5	5
	SUB-TOTAL V				60	50
VI	PENGGAJIAN, PENGHARGAAN, DAN DISIPLIN (10%)	1. Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;	Tunjangan kinerja memperhitungkan aspek penilaian kinerja dengan bobot lebih besar dari pada aspek disiplin;	2,5	10	10
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan nonfinansial terhadap pegawai berprestasi;	Sudah pernah memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi, namun belum menjadi agenda tetap/terjadwal;	2,5	10	2,5
		3. Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya;	Sudah menetapkan peraturan tentang kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansi dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai;	2,5	10	7,5
		4. Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai;	Database terkait penegakan disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian (data kinerja dan kompetensi) namun belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (BKN)	2,5	7,5	7,5
	SUB-TOTAL VI				37,5	27,5
VII	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN (4%)	1. Kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang	Belum ada kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional)	2	8	4

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
		diselenggarakan secara nasional);				
		2. Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi;	Menyediakan sistem pelayanan keuangan, pelayanan kepegawaian serta sistem lain yang memudahkan aktivitas pegawai (daftar kehadiran, permohonan cuti dll.);	2	8	8
	SUB-TOTAL VII				16	12
VIII	SISTEM INFORMASI (6%)	1. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;	Sudah membangun Sistem Informasi Kepegawaian berbasis online, menyajikan data realtime serta terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;	2	8	6
		2. Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online;	Sudah menerapkan e-performance yang terintegrasi dengan sistem informasi tentang penghargaan (tunjangan kinerja);	1	4	3
		3. Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian;	Pelayanan administrasi kepegawaian dilakukan secara manual dan e-office;	1	4	3
		4. Pembangunan dan penggunaan assessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi;	Sudah menggunakan sistem penilaian kompetensi pegawai memanfaatkan assessment center untuk JPT, Administrator dan Pengawas;	2	4	4
	SUB-TOTAL VIII				20	16
	TOTAL				333,5	258
	CATATAN					

Sumber : Aplikasi sipinter

Penilaian Indeks Sistem Merit sampai dengan triwulan I 2024, merupakan hasil penilaian yang sudah ditetapkan oleh KASN pada Tahun 2023 yaitu sebesar 258 dengan nilai indeks 0,62, kategori Baik. Hasil tersebut melebihi target capaian tahun 2024 yaitu sebesar 0,50. Hal-hal yang mendorong tercapainya target tersebut adalah dengan menyusun dan melengkapi data dukung yang dibutuhkan serta melaksanakan beberapa sub aspek sistem merit:

1. Aspek Perencanaan Kebutuhan :
 - a. Dokumen rencana kebutuhan pegawai tahunan
 - b. Dokumen rencana kebutuhan pegawai 5 tahunan
2. Aspek Pengadaan :
 - a. KAK tentang Pedoman Pengadaan ASN
 - b. Laporan evaluasi latsar
3. Aspek Pengembangan Karir :
 - a. Melaksanakan asesmen serta menyusun dokumen pegawai yang telah melaksanakan asesmen
 - b. Dokumen analisis kesenjangan kualifikasi
 - c. Laporan diklat pegawai terbaru
 - d. KAK coaching, mentoring dan magang
 - e. Dokumentasi coaching mentoring
4. Aspek Promosi dan Mutasi :
 - a. Dokumen pelaksanaan seleksi terbuka
5. Aspek Manajemen Kinerja :
 - a. Rekap analisis kesenjangan kinerja seluruh pegawai
 - b. Pengembangan aplikasi 360 derajat untuk menilai sikap, perilaku dan kinerja pegawai
6. Aspek Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin :
 - a. Draft Peraturan Bupati Temanggung tentang Perlindungan, Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai
 - b. Dokumentasi sosialisasi tentang kedisiplinan
7. Aspek Perlindungan dan Pelayanan :
 - a. Draft Peraturan Bupati Temanggung tentang Perlindungan, Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai
 - b. Dokumentasi kegiatan perlindungan dan pelayanan pegawai di bidang kesehatan dan hukum
8. Aspek Sistem Informasi :
 - a. Pengembangan aplikasi sinta merit untuk menampilkan profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta
 - b. Dokumen integrasi SIMPEG

b. Indeks Profesionalitas ASN

Penilaian secara terperinci nilai indeks IP ASN dengan penghitungan mandiri dan yang dilakukan oleh BKN dari tahun 2019 sampai dengan triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5

IP ASN pemerintah kabupaten Temanggung
tahun 2019- triwulan I 2024

No	Dimensi Pengukuran	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kualifikasi	10,34	10,82	11,907	12,39	20,98	21,04
2.	Kompetensi	11,48	9,15	9,343	12,73	13,6	11,86
3.	Kinerja	25,07	25,09	25	23,01	24,97	23,99
4.	Disiplin	4,95	4,97	4,997	5	5	5
TOTAL		46	51,84	50,03	51,247	64,55	61,9

Tabel 2.6

Pencapaian skor dimensi IP ASN triwulan I tahun 2024

Dimensi IP	Bobot	Skor riil	Capaian (dengan pembulatan)
Kualifikasi	25% (0,25)	21,04	84,16%
Kompetensi	40% (0,40)	11,86	29,65%
Kinerja	30% (0,30)	23,99	79,97%
Disiplin	5% (0,05)	5	100%

Berdasarkan tabel pencapaian dimensi IP ASN diatas, terlihat bahwa pencapaian skor paling rendah terlihat pada dimensi kompetensi yaitu sebesar 29,65%, padahal bobot dimensi kompetensi menyumbang nilai paling besar terhadap pengukuran IP ASN yaitu sebesar 40%. Skor dimensi kompetensi diperoleh melalui pendataan terhadap riwayat keikutsertaan PNS dalam kegiatan diklat atau bimbingan teknis minimal 20 JP selama 1 tahun terakhir dan seminar selama 2 tahun terakhir yang relevan dengan tugas dan jabatannya. Di masa pandemi Covid-19 dilakukan *refocusing* anggaran sehingga terjadi pengurangan anggaran pengembangan kompetensi PNS, hal ini akan berpengaruh terhadap menurunnya capaian IP ASN di tahun mendatang.

Capaian IP ASN triwulan I tahun 2024 yaitu sebesar 61,9 lebih tinggi 0,15 dari target yang direncanakan yaitu 61,75. Nilai IP ASN yang melebihi target tersebut disebabkan oleh sudah terinputnya sebagian besar data kinerja pegawai (P2KP) dan data kompetensi pegawai (sertifikat diklat) yang merupakan bagian dari dimensi penilaian IP ASN.

c. Cakupan Pengembangan SDM Aparatur

Tabel 2.7

Capaian Cakupan Pengembangan SDM Aparatur Triwulan I 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Penghitungan	Tahun		
					2022	2023	2024
1.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	%	((Jumlah Formasi ASN yang disetujui Kemenpan / Jumlah Formasi ASN yang diusulkan x 100%) + (Jumlah pejabat struktural yang ada / Jumlah pejabat struktural yang seharusnya ada x 100%) + (Jumlah PNS mengikuti Diklat Struktural / Jumlah Pejabat Struktural x 100%) + (Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional / Jumlah ASN fungsional x 100%) + (Jumlah ASN yang mengikuti Diklat teknis / Jumlah ASN Selain Struktural & Fungsional x 100%)) / 5	NA	NA	37,983
				Jumlah Formasi ASN yang disetujui Kemenpan			453
				Jumlah Formasi ASN yang diusulkan			453
				Jumlah pejabat struktural yang ada			476
				Jumlah pejabat struktural yang seharusnya ada			539
				Jumlah PNS mengikuti Diklat Struktural			5
				Jumlah Pejabat Struktural yang belum mengikuti Diklat			393
				Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional			7

			Jumlah ASN fungsional			4260
			Jumlah ASN yang mengikuti Diklat teknis			4
			Jumlah ASN Selain Struktural & Fungsional			3020
			Jumlah ASN			8017
			Jumlah Pensiun ASN			84

Berdasarkan tabel 2.7 nilai capaian Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan Layanan Aparatur di atas, menunjukkan bahwa skala nilai peringkat kinerja Triwulan I tahun 2024 yaitu Tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya faktor pendorong yang meliputi Anggapan kenaikan pangkat sebagai hak setiap PNS dan Tugas PD berusaha untuk mengusulkan kenaikan pangkat tepat waktu, akan tetapi ada juga faktor penghambatnya, yaitu kurangnya pemahaman ASN yang akan mengusulkan kenaikan pangkat tentang persyaratan sesuai peraturan yang berlaku sehingga masih terdapat dokumen usulan yang tidak diketahui BKN karena tidak memenuhi syarat (TMS). Upaya yang dilakukan untuk mencapai Target Kinerja Tahun 2024 adalah dengan mengadakan sosialisasi yang lebih intensif tentang persyaratan kenaikan pangkat sesuai peraturan yang berlaku ke pengelola kepegawaian maupun ASN.

d. Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan Layanan Aparatur

Tabel 2.8

Capaian Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan Layanan Aparatur
Triwulan I 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Penghitungan	Tahun		
					2022	2023	2024
1.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan Layanan Aparatur	%	((Jumlah ASN Pelaksana yang ada / Jumlah kebutuhan ASN Pelaksana yang seharusnya tertata x 100%) + (Jumlah kenaikan pangkat ASN yang disetujui BKN / Jumlah kenaikan pangkat ASN yang disetujui BKN x 100%)) / 2	NA	NA	66,82
				Jumlah ASN Pelaksana			3019

				yang ada			
				Jumlah kebutuhan ASN Pelaksana yang seharusnya tertata			5583
				Jumlah kenaikan pangkat ASN yang disetujui BKN			549
				Jumlah usulan kenaikan pangkat ke BKN			690

Berdasarkan tabel 2.8 nilai capaian indikator Cakupan Pengembangan SDM Aparatur di atas, menunjukkan bahwa skala nilai peringkat kinerja Triwulan I tahun 2024 yaitu tinggi, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor pendorong. Faktor pendorong tersebut meliputi Komitmen dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) untuk segera dilakukan pengisian jabatan yang kosong dan adanya penyederhanaan birokrasi, serta tawaran keikutsertaan Diklat Teknis/Fungsional tidak hanya dari Badan Diklat Provinsi Jateng (BPSDMD) akan tetapi juga dari instansi vertikal penyelenggara diklat. Faktor penghambat yang meliputi Keterbatasan SDM yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan struktural dan Keterbatasan kuota dari penyelenggara diklat manajerial, teknis dan fungsional (BPSDMD Prov. Jateng) dan keterbatasan keuangan daerah untuk pembiayaan diklat. Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024 yaitu melakukan kerjasama dengan Badan Diklat Kemendagri dan Badan Diklat Prov. DIY, dan mengusulkan peserta untuk mengikuti diklat yang tidak berbayar ke BPSDM Kemendagri.

e. Cakupan Pembinaan SDM Aparatur

Tabel 2.9

Capaian Cakupan Pembinaan SDM Aparatur Triwulan I 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Penghitungan	Tahun		
					2022	2023	2024
1.	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Cakupan Pembinaan SDM Aparatur	%	((Jumlah ASN yang tidak dijatuhkan hukuman disiplin / Jumlah ASN x 100%) + (Jumlah ASN yang melaporkan LHKPN / Jumlah ASN yang wajib melaporkan LHKPN x 100%) + (Jumlah ASN yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan (satya lencana) / Jumlah ASN yang seharusnya mendapatkan penghargaan (satya lencana) x 100%)) / 3	NA	NA	99,98

			Jumlah ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin			8062
			Jumlah ASN			8066
			Jumlah ASN yang melaporkan LHKPN			509
			Jumlah ASN yang wajib melaporkan LHKPN			509
			Jumlah ASN yang disetujui untuk mendapatkan penghargaan (satya lencana)			32
			Jumlah ASN yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan (satya lencana)			32

Berdasarkan tabel 2.9 nilai capaian indikator Cakupan Pembinaan SDM Aparatur di atas, menunjukkan bahwa skala nilai peringkat kinerja Triwulan I tahun 2024 sangat tinggi. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor pendorong. Faktor pendorong tersebut yaitu meningkatnya kepatuhan ASN/PNS terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian. Faktor penghambat yaitu Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terhadap para pejabat struktural belum tersampaikan kepada para pejabat pelaksana/fungsional. Upaya yang dilakukan untuk mencapai Target Kinerja Tahun 2024 yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada unit PD terkecil secara non formal.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja BKPSDM dari 5 indikator terdapat 5 indikator yang telah mencapai target 100%
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM, antara lain :
 - a) Bidang Kepegawaian

Capaian Indeks Profesionalitas ASN pada Triwulan I Tahun 2024 masih rendah yaitu di angka 61,9 atau jika dalam nilai prestasi

kerja masih pada kategori rendah (61-70). Hal ini disebabkan karena belum terkoneksi data kepegawaian dengan perhitungan indeks, dan belum semua pegawai melakukan update dan upload data kepegawaian seperti P2KP (kinerja) dan sertifikat diklat (kompetensi) yang merupakan salah satu aspek dalam dimensi penilaian IP ASN. Pencapaian skor paling rendah ada pada dimensi kompetensi yaitu sebesar 32%, padahal bobot dimensi kompetensi menyumbang nilai paling besar terhadap pengukuran IP ASN yaitu sebesar 40%. Skor dimensi kompetensi diperoleh melalui pendataan terhadap riwayat keikutsertaan PNS dalam kegiatan diklat atau bimbingan teknis minimal 20 JP selama 1 tahun terakhir dan seminar selama 2 tahun terakhir yang relevan dengan tugas dan jabatannya. Di masa pandemi Covid-19 dilakukan *refocusing* anggaran sehingga terjadi pengurangan anggaran pengembangan kompetensi PNS, hal ini berpengaruh terhadap pencapaian IP ASN.

b) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Menurut UU No 20 Tahun 2023, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja,

dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Di dalam upayanya untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN, pada tahun 2023 BKPSDM Kabupaten Temanggung telah memfasilitasi pelaksanaan pelatihan, baik dalam bentuk pengiriman peserta untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan, fungsional, serta teknis maupun penyelenggaraan bimbingan teknis. Sebagai hasilnya, capaian IP ASN Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 sebesar 64,54 dari target yang ditetapkan sebesar 50,09. Meskipun capaian IP ASN tersebut telah melebihi target yang ditetapkan, akan tetapi capaian tersebut masih dikategorikan rendah. Hal ini dikarenakan anggaran pendidikan dan pelatihan belum sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus mengalokasikan untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi ASN sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja. Sementara saat ini alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebesar 0,017 % dari total belanja. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut, telah dilakukan berbagai strategi untuk mencapai target dimaksud dengan cara memberikan kesempatan yang luas bagi PNS untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional secara mandiri serta koordinasi secara intensif dengan lembaga penyelenggara pelatihan agar diperoleh informasi pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan fungsional yang tidak berbayar salah satunya adalah MOOC (*Massive Open Online Course*) yang diselenggarakan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Terhadap permasalahan dan hambatan sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan upaya mengatasinya sebagai berikut:

- Koordinasi yang intensif dengan BKN selaku pengelola data kepegawaian (SAPK) dan pemberi rekomendasi/ yang mengeluarkan nilai indeks. Sebagian pegawai telah melakukan update data kepegawaian seperti P2KP (kinerja) dan sertifikat diklat (kompetensi) yang merupakan aspek dalam dimensi penilaian dalam IP ASN.

- Melakukan kerjasama dengan Badan Diklat Kemendagri dan Badan Diklat Prov.DIY, dan mengusulkan peserta untuk mengikuti diklat yang tidak berbayar ke BPSDM Kemendagri.

2.1 **Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan pagu indikatif pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp.8.004.249,00.
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp10.008.800,00 dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp130.002.200,00.
2. Terdapat penambahan pagu indikatif Program Kepegawaian Daerah
 - a. Kegiatan Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN sebesar Rp.1.046.000.000,00; Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian sebesar Rp2.500.000,00 dan Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian sebesar Rp38.750.000,00 untuk kebutuhan pengembangan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dalam mendukung peningkatan *Merit System* dan IP ASN.
 - b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, Sub Kegiatan Pengelolaan kenaikan pangkat ASN sebesar Rp2.500.000,00 dan Sub

- Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN untuk Selter JPT Eselon II.a/II.b untuk 2 jabatan kosong sebesar Rp275.000.000,00.
- c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan Pengelolaan *Assessment Center* sebesar Rp.662.990.000,00 dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional sebesar Rp2.500.375,00.
 - d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Sub Kegiatan Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sebesar Rp9.800.000,00 untuk Kebutuhan biaya rapat penyusunan perbup TPP; Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebesar Rp5.500.000,00 untuk Kebutuhan medical check up ASN, perjalanan dinas dalam kota untuk monitoring cuti sakit, honor narasumber untuk kegiatan talkshow; Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN sebesar Rp5.500.000,00 untuk Kebutuhan honor narasumber, leaflet disiplin ASN; dan Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN sebesar Rp750.000,00 untuk Kebutuhan minimal pelaksanaan kegiatan penyelesaian pelanggaran disiplin.
3. Terdapat penambahan pagu indikatif Program Pengembangan SDM Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan sebesar Rp.3.306.710.000,00 untuk kebutuhan diklat dasar JF, Diklatpim, Latsar dan MOOC Orientasi PPPK.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
1	KEPEGAWAIAN						1	KEPEGAWAIAN						
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temang gung	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang/ bulan	3.926.081.531		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temang gung	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang/ bulan	3.926.081.531	
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kab. Temang gung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	12	Paket	3.099.500		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temang gung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	12	Paket	3.099.500	
	- Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Temang gung	Tersedianya bahan logistik kantor	12	Paket	19.499.000		- Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Temang gung	Tersedianya bahan logistik kantor	12	Paket	19.499.000	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temang gung	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Paket	19.000.000		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temang gung	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Paket	19.000.000	
	- Fasilitas kunjungan tamu	Kab. Temang gung	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12	Laporan	39.993.840		- Fasilitas kunjungan tamu	Kab. Temang gung	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12	Laporan	39.993.840	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	49.217.000
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	3.500.000
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Tersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	39.989.400
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	257.600.748
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda					
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kab. Temanggung	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	19	Unit	81.251.200

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	49.217.000	
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	3.500.000	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Tersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	39.989.400	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	265.604.997	Usulan tambahan Rp8.004.249 (Alat Kebersihan: 3.004.249, Seragam Satpam: 5.000.000)
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda						
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kab. Temanggung	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	19	Unit	81.251.200	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	- Pemeliharaan Mebel	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	353	Unit	1.997.400
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya	408	Unit	24.991.200
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Unit	49.999.000
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor dan Bangunan Lainnya	45	Unit	1.996.360
B.	Program Kepegawaian Daerah					
1.	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian					
	- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	105.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Pemeliharaan Mebel	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	353	Unit	1.997.400	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya	408	Unit	35.000.000	Tambahan Servis laptop komputer Rp10.008.800
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Unit	180.001.200	Tambahan Kebutuhan renovasi cat, sekat ruangan Rp130.002.200
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor dan Bangunan Lainnya	45	Unit	1.996.360	
B.	Program Kepegawaian Daerah						
1.	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian						
	- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	1.151.500.000	Kebutuhan pengadaan ASN dengan APBD (CAT PPPK: 187.000.000 Pengadaan CPNS: 811.000.000 (2 kali) Operasional: 153.000.000)

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	- Koordinasi Pelaksanaan administrasi pemberhentian	Kab. Temanggung	Jumlah dokumen hasil koord. Pelaksanaan administrasi pemberhentian	400	Dokumen	7.500.000
	- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Temanggung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	11.250.000
2.	Mutasi dan Promosi ASN					
	- Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	750	Dokumen	7.500.000
	- Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6	Dokumen	45.000.000
3.	Pengembangan Kompetensi ASN					
	- Pengelolaan Assessment Center	Kab. Temanggung	Jumlah dokumen pengelolaan assessment	1	Dokumen	112.500.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Koordinasi Pelaksanaan administrasi pemberhentian	Kab. Temanggung	Jumlah dokumen hasil koord. Pelaksanaan administrasi pemberhentian	400	Dokumen	10.000.000	
	- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Temanggung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	50.000.000	Kebutuhan pengembangan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dalam mendukung peningkatan merit system dan IP ASN
2.	Mutasi dan Promosi ASN						
	- Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	750	Dokumen	10.000.000	
	- Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6	Dokumen	300.000.000	Selter JPT Eselon II.a/II.b untuk 2 jabatan kosong
3.	Pengembangan Kompetensi ASN						
	- Pengelolaan Assessment Center	Kab. Temanggung	Jumlah dokumen pengelolaan assessment	1	Dokumen	790.530.000	Kebutuhan Assessment bagi JPT 31 Orang @5Jt, Pengawas 237 Orang @590.000,

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
														Pelaksana/J F 624 Orang @590.000, + Biaya Operasional + Bantuan Transportas
	- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Temang gung	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	12	Orang	0		- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Temang gung	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	12	Orang	0	
	- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Temang gung	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	400	Orang	7.499.625		- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Temang gung	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	400	Orang	10.000.000	
4.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						4.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
	- Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3	Dokumen	7.500.000		- Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3	Dokumen	17.300.000	Kebutuhan biaya rapat penyusunan perbup TPP
	-Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Laporan	7.500.000		-Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Temang gung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Laporan	13.000.000	Kebutuhan medical check up ASN, sppd dalam daerah untuk monitoring cuti sakit, honor

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	-Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Temanggung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	300	Orang	7.500.000
	- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	Laporan	6.750.000
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
1.	Pengembangan Kompetensi Teknis Umum					
	-Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan	Kab. Temanggung	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		Orang	40.500.000
2.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
							narasumber untuk kegiatan talkshow	
	-Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Temanggung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	300	Orang	13.000.000	Kebutuhan honor narasumber, leaflet disiplin ASN	
	- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	Laporan	7.500.000	Kebutuhan minimal pelaksanaan kegiatan penyelesaian pelanggaran disiplin	
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
1.	Pengembangan Kompetensi Teknis Umum							
	-Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan	Kab. Temanggung	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		Orang	40.500.000		
2.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
1	- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3	Laporan	416.250.000	1	- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3	Laporan	3.722.960.000	Kebutuhan -diklat dasar JF (2th sejak diangkat JF 2023): 2.050.000.000 -diklatpim: 1.227.960.000 -Latsar CPNS : 385.000.000 -MOOC Orientasi 374 PPPK: 60.000.000

Sumber : BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (NIHIL)

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di BKPSDM ada 3 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.11
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2021-2023

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1.	Pemutakhiran E-SKP	ASN	--	ASN memasukkan butir-butir kegiatan sasaran kinerja pegawai (SKP) sesuai dengan jenis jabatan ASN ke aplikasi E-Kinerja pada modul SKP melalui akun masing-masing ASN. SKP yang dimasukkan sesuai dengan perjanjian kinerja (PK) masing-masing ASN. Kinerja pegawai bisa dimasukkan apabila sasaran SKP sudah dimasukkan.	Integrasi SKP dengan kinerja pegawai	Mengintegrasikan butir kegiatan SKP dengan kinerja ASN, sehingga SKP ASN akan sinkron dengan kinerja hariannya dan dapat dinilai secara periodik.	Dinkominfo & BKPSDM / 2021
2.	KOMPAK (Komunikasi Kepegawaian) Centre	BKPSDM		Merupakan suatu wadah untuk ASN Kabupaten Temanggung berbentuk Podcast pada Alamat Youtube BKPSDM Temanggung. Dengan adanya KOMPAK CENTRE diharapkan ASN Kabupaten Temanggung dapat menerima informasi terkait aturan dan layanan kepegawaian tanpa harus datang ke BKPSDM namun hanya dengan mendengarkan dan melihat podcast di Youtube BKPSDM.	Tersedianya layanan informasi BKPSDM melalui media podcast	Inovasi tersebut merupakan salah satu resolusi BKPSDM yaitu pelayanan kepegawaian berbasis digital dan untuk menuju <i>Smart ASN</i> .	BKPSDM 2021
3.	Dataku Tanggung Jawabku	ASN	--	Latar belakangnya, masih banyak ASN yang kurang, bahkan tidak peduli dengan datanya sendiri. ASN berpangku tangan dan menyerahkan semua tanggung jawab data kepegawaiannya kepada pengelola kepegawaian. Akibatnya, jika data kepegawaian tidak update dan tidak lengkap maka: <ul style="list-style-type: none"> - Menghambat proses kenaikan pangkat - Menghambat proses pensiun - Menjadi faktor kesalahan dalam pengambilan kebijakan 	Meningkatnya kepedulian ASN terhadap pentingnya data kepegawaian	Inovasi ini dalam rangka mengoptimalkan Aplikasi SIMPEG BKPSDM dan layanan kepegawaian yang semakin <i>go green/paperless</i> .	BKPSDM 2022

				- Menghambat proses ijin belajar - Menghambat penyesuaian gelar pendidikan, dll			
--	--	--	--	---	--	--	--

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui BKPSDM ada 2 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.12
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2023

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Peringkat Terbaik ke-3 dalam Pengelolaan Layanan Informasi Kepegawaian Tahun 2021	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Se-Wilayah Kerja Kantor Regional I BKN Yogyakarta	BKPSDM
2.	Anugerah Meritokrasi Penilaian Penerapan Sistem Merit Tahun 2023 dengan kategori Baik atau kategori III (Nilai 258, Indeks 0,62)	KASN	Nasional	BKPSDM

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

BKPSDM Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh BKPSDM lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua untuk pembangunan jangka menengah Kabupaten Temanggung tiga tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. BKPSDM Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi salah satu arah kebijakan nasional yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Tujuan BKPSDM yang dirumuskan dalam Renstra BKPSDM 2024-2026 adalah “Meningkatnya kualitas SDM Aparatur” dengan sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM Aparatur”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja BKPSDM.
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2025 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target BKPSDM Kab. Temanggung pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2026
Meningkatnya kualitas SDM Aparatur			Indeks Merit System	Angka	0,55	0,61
	Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM Aparatur		Indeks Profesionalitas ASN	Angka	60,80	60,85
		Program Kepegawaian	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	%	42,36	42,57
			Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan Layanan Aparatur	%	86,58	87,67
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pembinaan SDM Aparatur	%	96,15	96,17

Sumber : Renstra BKPSDM Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi BKPSDM Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra BKPSDM Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan Sasaran BKPSDM Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan BKPSDM Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2025.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja BKPSDM Tahun 2025 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
BKPSDM Kab. Temanggung Tahun 2025

RANCANGAN RENJA BKPSDM TAHUN 2025			RKPd KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN	4.848.977.431,-	A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN	4.848.977.431,-	0,-
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.518.215.431,-	1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.518.215.431,-	0,-
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.926.081.531,-	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.926.081.531,-	0,-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.926.081.531,-		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.926.081.531,-	0,-
b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.809.340,-	b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.809.340,-	0,-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.099.500,-		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.099.500,-	0,-
	Penyediaan Logistik Kantor	19.499.000,-		Penyediaan Logistik Kantor	19.499.000,-	0,-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.000.000,-		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.000.000,-	0,-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.993.840,-		Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.993.840,-	0,-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.217.000,-		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.217.000,-	0,-
c.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	301.089.400,-	c.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	301.089.400,-	0,-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,-	0,-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.989.400,-		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.989.400,-	0,-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257.600.000,-		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257.600.000,-	0,-
d.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.995.020,-	d.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.995.020,-	0,-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	81.251.200,-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	81.251.200,-	0,-

	Pemeliharaan Mebel	1.997.400,-		Pemeliharaan Mebel	1.997.400,-	0,-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	24.991.200,-		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	24.991.200,-	0,-
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.999.000,-		Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.999.000,-	0,-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1.996.360,-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1.996.360,-	0,-
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	330.762.000,-	2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	330.762.000,-	0,-
a.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	136.512.000,-	a.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	136.512.000,-	0,-
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	97.499.500,-		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	97.499.500,-	0,-
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	10.000.000,-		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	10.000.000,-	0,-
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	29.012.500,-		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	29.012.500,-	0,-
b.	Mutasi dan Promosi ASN	55.000.000,-	b.	Mutasi dan Promosi ASN	55.000.000,-	0,-
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	10.000.000,-		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	10.000.000,-	0,-
	Pengelolaan Promosi ASN	45.000.000,-		Pengelolaan Promosi ASN	45.000.000,-	0,-
c.	Pengembangan Kompetensi ASN	110.000.000,-	c.	Pengembangan Kompetensi ASN	110.000.000,-	0,-
	Pengelolaan Assessment Center	100.000.000,-		Pengelolaan Assessment Center	100.000.000,-	0,-
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	0,-		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	0,-	0,-
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	10.000.000,-		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	10.000.000,-	0,-
d.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	29.250.000,-	d.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	29.250.000,-	0,-
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7.500.000,-		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7.500.000,-	0,-
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7.500.000,-		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7.500.000,-	0,-
	Pembinaan Disiplin ASN	7.500.000,-		Pembinaan Disiplin ASN	7.500.000,-	0,-
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6.750.000,-		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6.750.000,-	0,-
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	456.750.000,-	B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	456.750.000,-	0,-
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	456.750.000,-		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	456.750.000,-	0,-

1	Pengembangan Kompetensi Teknis	40.500.000,-	1	Pengembangan Kompetensi Teknis	40.500.000,-	0,-
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	40.500.000,-		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	40.500.000,-	0,-
2	Sertifikasi Kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	416.250.000,-	2	Sertifikasi Kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	416.250.000,-	0,-
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	416.250.000,-		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	416.250.000,-	0,-
	JUMLAH	5.305.727.431,-		JUMLAH	5.305.727.431,-	0,-

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi tidak terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2025.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Temanggung
Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						5.305.727.431,00							7.387.929.928,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						5.305.727.431,00							7.387.929.928,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						4.848.977.431,00							5.242.775.928,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	<i>Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah</i>	100 %			100 %	4.518.215.431,00						100 %	4.676.475.928,00	

5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	-			100 %	3.926.081.531,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim	BKPSDM Kabupaten Temanggung	-	3.926.081.531,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
--------------	--	---	---	--	--	-------	------------------	--	--	---	--	-----------------------------	---	------------------	--

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				35 Orang/ bulan	3.926.081.531,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskin	BKPSDM Kabupaten Temanggung	3.926.081.531,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	------------------	--	--------------------------------------	---	--	-----------------------------	------------------	--

												nan ekstrim , pe ningkat an rata-rat a lama sekolah , serta penin gkatan sumber daya manusi a van					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah</i>	-			100 %	130.809.340,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan	BKPSDM Kabupaten Temanggung	-	137.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
--------------	------------------------------------	---	---	--	--	-------	----------------	--	--	---	--	-----------------------------	---	----------------	--

											ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yang				
5.03.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.099.500,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang	BKPSDM Kabupaten Temanggung	4.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

											stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia				
5.03.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	39.993.840,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berakarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. peningkatan	BKPSDM Kabupaten Temanggung		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	49.217.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskin	BKPSDM Kabupaten Temanggung	52.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
--	--	--	---	--	--	--	------------	---------------	--	--------------------------------------	---	--	-----------------------------	---------------	--

											nan ekstrim , pe ningkat an rata-rat a lama sekolah , serta penin gkatan sumber daya manusi a van				
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah</i>	-			100 %	301.089.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan,	BKPSDM Kabupaten Temanggung	-	303.094.397,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

											dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia					
5.03.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	3.500.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif	BKPSDM Kabupaten Temanggung		3.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

											secara inklusif dan merata 1. penin atan cakupan dan kualita s pelayan an dasar bidang kesehat an, pendidi kan, dan sosial dalam rangka percepa tan penuru nan stuntin g, percepa tan penuru nan kemiski nan ekstrim , pe ningkat an rata-rat a lama sekolah , serta penin gkatan sumber daya manusi a yan				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	5.03.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	39.989.400,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	BKPSDM Kabupaten Temanggung		39.989.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	257.600.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskin	BKPSDM Kabupaten Temanggung	59.604.997,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
--	--	--	--	--	--	--	------------	----------------	--	--------------------------------------	---	--	-----------------------------	---------------	--

											nan ekstrim , pe ningkat an rata-rat a lama sekolah , serta penin gkatan sumber daya manusi a van				
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan perangkat daerah</i>	-			100 %	160.235.160,00			Meningka tk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	2. Pening k atan kualita s sumber daya manusi a yang lebih pintar, sehat, bugar, berk arakter , dan adaptif secara inklusif dan merata 1. penin atan cakupan dan kualita s pelayan an dasar bidang kesehat an, pendidi kan,	BKPSDM Kabupaten Temanggun g	-	310.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA

											dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia					
5.03.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	81.251.200,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif	BKPSDM Kabupaten Temanggung		90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

											secara inklusif dan merata 1. penin- atan cakupan dan kualita- s pelayan- an dasar bidang kesehat- an, pendidi- kan, dan sosial dalam rangka percepa- tan penuru- nan stuntin- g, percepa- tan penuru- nan kemiski- nan ekstrim , pe- ningkat- an rata-rat- a lama sekolah , serta penin- gkatan sumber daya manusi- a yan				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

	5.03.01.2.09.005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				353 Unit	1.997.400,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	BKPSDM Kabupaten Temanggung		2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	49.999.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskin	BKPSDM Kabupaten Temanggung	180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
--	--	--	--	--	--	--------	---------------	--	--------------------------------------	---	--	-----------------------------	----------------	--

												bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia				
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	<i>Cakupan Pengembangan SDM</i> <i>Aparatur</i> <i>Cakupan</i> <i>Peningkatan</i> <i>Pendayagunaan Aparatur</i> <i>dan layanan</i> <i>Aparatur</i>	42,57 % 42,57 % 87,67 % 87,67 % 42,57 % 87,67 %			42,36 % 86,58 %	330.762.000,00					42,57 % 42,57 % 87,67 % 87,67 % 42,57 % 87,67 %	566.300.000,00		

5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Informasi Kepegawaian ASN	-			3 dokumen	136.512.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskin	ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan seluruh WNI	-	168.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
--------------	--	---	---	--	--	-----------	----------------	--	--	---	--	---	---	----------------	--

			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				400 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiski	ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan seluruh WNI	11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
--	--	--	---	--	--	--	-------------	---------------	--	--------------------------------------	---	---	---	---------------	--

											bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia				
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Mutasi dan Promosi ASN</i>	-			2 dokumen	55.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif	ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	-	161.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

											secara inklusif dan merata 1. penin atan cakupan dan kualita s pelayan an dasar bidang kesehat an, pendidi kan, dan sosial dalam rangka percepa tan penuru nan stuntin g, percepa tan penuru nan kemiski nan ekstrim , pe ningkat an rata-rat a lama sekolah , serta penin gkatan sumber daya manusi a yan				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	5.03.02.2.02.002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				750 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFERR UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. perhatian cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting,	ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung		11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

											kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	<i>Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pengembangan Kompetensi ASN</i>	-			3 dokumen	110.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan	ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	-	181.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
--------------	-----------------------------	---	---	--	--	-----------	----------------	--	--	---	--	---	---	----------------	--

			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				12 Orang	0,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiski	ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
--	--	--	---	--	--	--	----------	------	--	--------------------------------------	---	---	---	------	--

											bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia				
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	-			4 dokumen	29.250.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif	ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	-	56.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

											secara inklusif dan merata 1. penin atan cakupan dan kualita s pelayan an dasar bidang kesehat an, pendidi kan, dan sosial dalam rangka percepa tan penuru nan stuntin g, percepa tan penuru nan kemiski nan ekstrim , pe ningkat an rata-rat a lama sekolah , serta penin gkatan sumber daya manusi a yan				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	5.03.02.2.04.001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			3 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting,	ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				300 Orang	7.500.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan	ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	13.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
--	--	--	--	--	--	--	-----------	--------------	--	--------------------------------------	---	--	---	---------------	--

											ke sehat an, pendi dikan, dan sosial dalam rangka percep tan penuru nan stuntin g, percep tan penuru nan kemiski nan ekstrim , pe ningkat an rata-rat a lama sekolah , serta penin gkatan sumber daya manusi a yan				
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						456.750.000,00							2.145.154.000,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	<i>Cakupan Pembinaan SDM Aparatur</i>	97 %			97 %	456.750.000,00						97 %	2.145.154.000,00	

5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis	-			1 Laporan	40.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskin	ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	-	315.781.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
--------------	--------------------------------	---	---	--	--	-----------	---------------	--	--	---	--	---	---	----------------	--

											kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia				
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	<i>Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>	-			1 Laporan	416.250.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berakhlak, dan adaptif secara	BKPSDM Kabupaten Temanggung	-	1.829.373.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

											<p>inklusif dan merata 1.</p> <p>perhatian cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan													
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				5 Laporan	416.250.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting,	BKPSDM Kabupaten Temanggung		1.829.373.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

											percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia				
	J U M L A H							5.305.727.431,00					7.387.929.928,00		

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi BKPSDM untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja BKPSDM Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di BKPSDM itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan BKPSDM dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja BKPSDM Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja BKPSDM Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2025 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 96,22 %, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 42,44 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2025 BKPSDM mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp5.305.727.431,00 yang terdiri dari 3 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Kepegawaian Daerah; dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran BKPSDM dapat tercapai

sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 10 Juli 2024



KEPALA BKPSDM

RIPTO SUSILO

Pembina Utama Muda

NIP. 19670427 198703 1 001